



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 12 Juni 2012

Halaman: 4

Bahas Transparansi Publik

BANTUL - Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat mendapat informasi. Hal itu menyebabkan transparansi informasi menjadi kebutuhan publik yang bisa diakses dengan mudah. Masyarakat dapat menilai penyelenggaraan negara yang digelar pemerintah akuntabel atau tidak.

Demikian dipaparkan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dalam *Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Peran Media Massa dalam Menjembatani Kebijakan Daerah* di Kampus Terpadu UMY (11/6). Haryadi mengatakan akuntabilitas dan legitimasi publik merupakan pilar penting menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut dia, salah satu upaya melakukan transparansi adalah dengan membuka seluas-luasnya akses masyarakat menyampaikan aspirasinya. Pemkot Jogja selalu memiliki program di media terkait komunikasi publik tersebut.

"Kami punya program seperti *Wali Kota Menyapa*. Lewat acara itu saya dapat menjawab 9-10 pertanyaan dari masyarakat secara langsung, yang kesemuanya terekam dengan baik. Setelah itu, ada tindak lanjut sebagai respon yang disampaikan masyarakat," ungkap Haryadi.

Menurutnya, acara tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, saran, maupun aspirasinya langsung kepada pemerintah.

Mantan wakil wali kota Jogja itu menyatakan akses komunikasi merupakan kunci membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konsep itu masyarakat diposisikan sebagai objek dan pemerintah adalah fasilitator.

Oleh karena itu, *trust* masyarakat sangat penting untuk memulai komunikasi yang baik. Harapannya, setelah tercipta proses komunikasi, maka akan ada informasi yang kemudian melahirkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan.

Pembicara lain, Pemred *Kedaulatan Rakyat*, Octo Lampito menambahkan banyak hal tentang media yang harus diketahui Humas Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pemberitaan terkait kebijakan pemerintah daerah.

Media punya kebijakan masing-masing, misalnya kebijakan editorial. Media juga memiliki *gatekeeper* yang akan ikut menentukan konten pemberitaan. Kadang-kadang, harus dapat dimengerti bila berita yang muncul tidak selalu sama dengan apa yang diinginkan Humas. "Untuk itu, penting bagi Humas Pemda memahami masing-masing kebijakan media," terangnya. (leg/iwa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005